

BAB I PENDAHULUAN

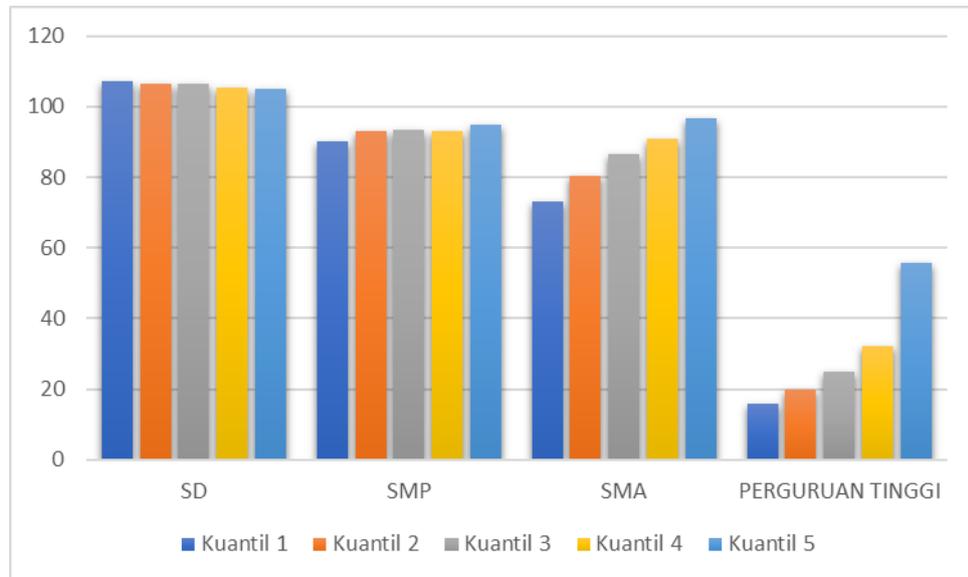
A. Latar Belakang

Di level internasional, masalah pendidikan tercantum dalam program *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang berfungsi sebagai pengembangan lanjutan dari program *Education for All, Millenium Development Goals (MDGs)*. Program *SDGs* diharapkan dapat terealisasi pada tahun 2030. Tujuan keempat dalam *SDGs* mengacu pada aspek pendidikan sebagai prioritasnya khususnya memastikan bahwa setiap orang memiliki akses terhadap pendidikan inklusif yang berkualitas tinggi dan memperluas kesempatan untuk belajar sepanjang hayat (United Nations, 2014). Pada level nasional, salah satu tujuan nasional negara Indonesia adalah meningkatkan kecerdasan masyarakat, yang diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, sesuai dengan Pasal 31 UUD 1945, setiap warga negara dijamin mendapatkan pendidikan dasar yang dibiayai oleh pemerintah. Pemerintah juga mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar minimal 20% dari pendapatan dan belanja negara serta daerah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan nasional. Namun, kesenjangan dalam akses pendidikan antara kelompok masyarakat masih menjadi isu yang relevan saat ini. (BPS, 2021a).

Menurut BPS (2021a) rumah tangga yang memiliki ekonomi yang stabil cenderung memiliki partisipasi yang lebih tinggi dalam pendidikan dibandingkan dengan rumah tangga yang mengalami kesulitan ekonomi. Hal ini terjadi karena besarnya biaya yang diperlukan oleh keluarga untuk mendukung proses pendidikan seperti biaya sekolah, alat tulis, uang saku dan lainnya. Partisipasi sekolah secara agregat dapat diukur melalui indikator Angka Partisipasi Kasar (APK). Indikator tersebut menggambarkan banyaknya siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu (Kemendikbud, 2021).

Berdasarkan Gambar 1 terlihat bahwa pada jenjang pendidikan SD dan SMP, Angka Partisipasi Kasar (APK) tersebar merata pada setiap kelompok pendapatan. Status ekonomi rendah digambarkan oleh kuantil 1 sedangkan status ekonomi tinggi digambarkan oleh kuantil 5. Angka Partisipasi Kasar (APK) terlihat tidak merata pada jenjang pendidikan SMA dan Perguruan Tinggi. Semakin tinggi

jenjang pendidikan, partisipasi anak untuk bersekolah semakin menurun. Biaya Pendidikan tingkat SMA dan Perguruan Tinggi saat ini masih menjadi beban penduduk karena pemerintah baru memberi subsidi biaya pendidikan di tingkat SD dan SMP yakni dengan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun. Fenomena ini juga kerap terjadi di berbagai negara berkembang (Attanasio et al., 2010).



Sumber: *Badan Pusat Statistik (BPS), 2021*

Gambar 1. Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Kelompok Pendapatan Tahun 2021

Program *Cash Conditional Transfer (CCT)* dipandang sebagai cara alternatif untuk memfasilitasi anak-anak dari lapisan masyarakat kurang mampu yang ingin mengejar pendidikan lebih tinggi, dan kebijakan tersebut sudah diterapkan oleh beberapa negara. Menurut Dearden (2009) dalam penelitiannya menemukan bahwa program *CCT* yang dilakukan yang dijalankan sebagai studi pendahuluan di Inggris, yaitu *Program Education Maintenance Allowance (EMA)*, merupakan langkah yang sesuai untuk meningkatkan partisipasi dalam pendidikan dan mengurangi tingkat putus sekolah.

Schultz (2004) juga melakukan evaluasi terhadap Program *CCT* yang diterapkan pada keluarga miskin di Meksiko, dikenal sebagai *Progresa*. Program ini berhasil meningkatkan tingkat pendaftaran sekolah bagi anak-anak dari keluarga miskin, meskipun peningkatannya hanya terjadi pada tingkat pendidikan dasar. (Dubois, de Janvry, and Sadoulet 2012). Program *Cash Conditional Transfer (CCT)* di Kolombia juga terbukti berhasil meningkatkan tingkat partisipasi sekolah bagi

anak-anak dari keluarga miskin melalui program yang dikenal dengan nama *The Familias en Acción programme* (Attanasio et al., 2010)

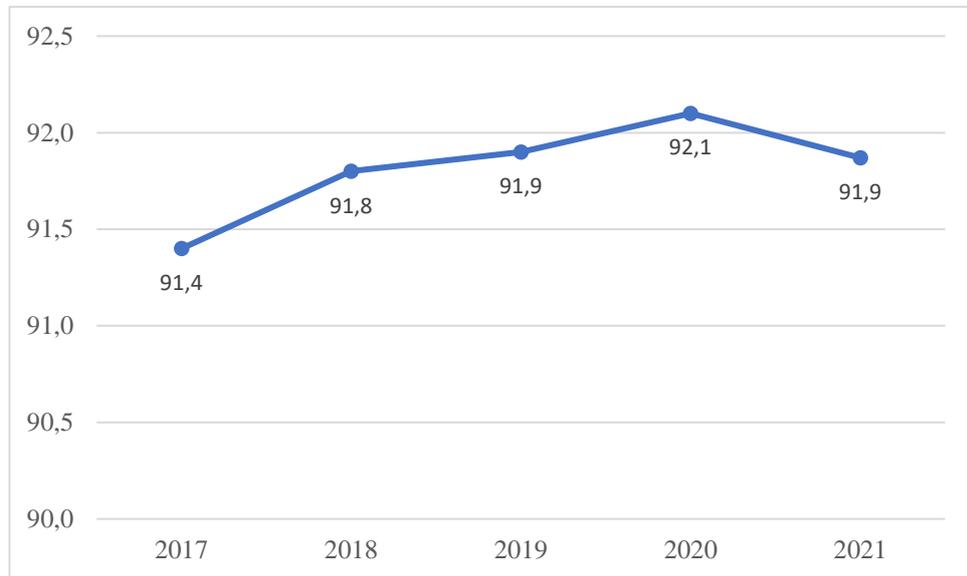
Melihat dari pengalaman negara-negara lain, Indonesia mencoba menerapkan pendekatan yang sama dengan program Bantuan Siswa Miskin (BSM) di tahun 2008. Seiring dengan pergantian presiden di tahun 2014, Pemerintah berusaha untuk meningkatkan cakupan dan memperluas manfaat dari Bantuan Siswa Miskin (BSM) serta mengubah namanya pada tahun 2015 menjadi Program Indonesia Pintar atau yang lebih dikenal dengan singkatan PIP. PIP adalah program bantuan yang mencakup pemberian uang tunai, akses yang lebih besar, dan peluang pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk siswa dan mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu atau rentan miskin, dengan tujuan mendukung biaya pendidikan mereka. Program ini menyediakan bantuan finansial untuk berbagai tingkat pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga tingkat pendidikan tinggi.

Program PIP yang telah berjalan saat ini di Indonesia sejalan dengan tujuan pada *Sustainable Development Goals (SDGs)* yaitu “Pendidikan untuk Semua”. Namun Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Meskipun angka penurunan anak-anak yang tidak bersekolah dari tahun ke tahun terjadi, kondisi ini masih dianggap cukup mengkhawatirkan Pada tahun 2015, sekitar 0,91% dari populasi usia 7-12 tahun, 5,28% dari populasi usia 13-15 tahun, dan 29,39% dari populasi usia 16-18 tahun tidak mengikuti pendidikan. Namun, pada tahun 2020, angka tersebut menurun menjadi 0,74% untuk usia 7-12 tahun, 4,26% untuk usia 13-15 tahun, dan 27,28% untuk usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah.

Data-data yang ada mengungkapkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak dapat memperoleh pendidikan selain itu tidak meratanya kualitas pendidikan antar daerah. Perbedaan kualitas pendidikan dapat dilihat dari segi pembangunan sarana maupun prasarananya. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat menggunakan angka partisipasi sekolah (APS). Peluang untuk mengakses pendidikan semakin besar seiring meningkatnya nilai Angka Partisipasi Sekolah (APS).

Berdasarkan Gambar 2 terlihat perkembangan nilai Angka Partisipasi Sekolah (APS) Indonesia dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2017 nilai Angka

Partisipasi Sekolah (APS) sebesar 91,4 persen kemudian meningkat pada tahun 2018 dan 2019 sebesar 91,8 persen dan 91,9 persen. Sama halnya dengan tahun sebelumnya pada tahun 2020 Angka Partisipasi Sekolah (APS) kembali meningkat menjadi 92,1 persen namun menurun pada tahun 2021 menjadi sebesar 91,9 persen.



Sumber: *Badan Pusat Statistik (BPS), 2021*

Gambar 2. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Indonesia (Persen), 2017 – 2021

Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang cenderung menurun di tahun 2021 tersebut cukup bertentangan dengan upaya pemerintah yang telah menyalurkan PIP kepada 17 juta siswa dengan total nilai mencapai 9,6 triliun rupiah di tahun 2021. Selain itu pemerintah juga mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 299 triliun untuk sektor pendidikan di tahun 2021 yang dialokasikan untuk kegiatan non fisik seperti tambahan tunjangan guru dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan untuk kegiatan fisik seperti pembangunan Gedung sekolah. Oleh sebab itu, perlu diteliti lebih lanjut mengenai seberapa besar dan dampak sesungguhnya Program Indonesia Pintar (PIP) terhadap partisipasi sekolah dan juga pengaruh variabel demografi lainnya terhadap partisipasi sekolah. Selain itu, karena Indonesia terdiri dari banyak pulau dan terdapat disparitas dalam penyebaran program pemerintah, penulis akan memperluas lokasi penelitian untuk menginvestigasi bagaimana Program Indonesia Pintar (PIP) memengaruhi partisipasi sekolah lintas pulau di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka pertanyaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak Program Indonesia Pintar (PIP) terhadap tingkat partisipasi sekolah di Indonesia ?
2. Bagaimana pengaruh Program Indonesia Pintar (PIP) terhadap tingkat partisipasi sekolah antar pulau di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan rumusan penelitian yang dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk menganalisis dampak Program Indonesia Pintar (PIP) terhadap partisipasi sekolah di Indonesia
2. Untuk menganalisis pengaruh Program Indonesia Pintar (PIP) terhadap partisipasi sekolah antar pulau di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan informasi tentang perhitungan dampak dan pengaruh Program Indonesia Pintar (PIP) terhadap partisipasi sekolah baik secara keseluruhan maupun antar wilayah di Indonesia.
2. Bagi ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperkaya literatur terkait program CCT khususnya tentang Program Indonesia Pintar (PIP) yang telah dilaksanakan oleh pemerintah serta memperkaya sumber pustaka bagi penelitian-penelitian selanjutnya

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang mengangkat isu tentang dampak program indonesia pintar terhadap partisipasi sekolah di Indonesia. Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah Regresi Diskontinu, *Ordinary Least Square* (OLS) dan analisis deskriptif untuk melihat gambaran dampak program indonesia pintar terhadap partisipasi sekolah di Indonesia. Dalam penelitian ini, pengamatan dilakukan pada tingkat nasional (Indonesia) secara

umum meliputi 34 provinsi dan kemudian dirinci menjadi 6 wilayah sebagai berikut: Sumatera terdiri dari 10 provinsi, Jawa mencakup 6 provinsi, Bali dan Nusa Tenggara terdiri dari 3 provinsi, Kalimantan mencakup 5 provinsi, Sulawesi terdiri dari 6 provinsi, dan Maluku-Papua terdiri dari 4 provinsi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) Maret Tahun 2021 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan cakupan sampel seluruh provinsi di Indonesia.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami serta untuk memberikan gambaran secara menyeluruh isi tesis maka disajikan melalui sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, membahas terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN LITERATUR, membahas terkait konsep dan teori, penelitian terdahulu, kerangka analisis dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN, memuat rancangan penelitian, pengumpulan data, pengolahan, analisis dan interpretasi data, tempat dan waktu penelitian, definisi operasional variabel penelitian dan deklarasi model penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, menggambarkan secara deskriptif gambaran umum wilayah penelitian, variabel-variabel yang dikaji dalam penelitian berdasarkan data dan perkembangan yang terjadi serta memaparkan hasil penelitian atau pembahasan dan implikasi kebijakan dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN, berisi tentang kesimpulan yang dihasilkan dari analisis dan pembahasan temuan penelitian serta saran atas kecurangan dan keterbatasan penelitian yang bisa menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan di waktu yang akan datang.